

Gulen Movement sebagai Counter-Hegemony

by 2017 2

Submission date: 01-Nov-2022 02:55PM (UTC+0700)

Submission ID: 1941259699

File name: -_Membaca_Kudeta_Turki_2016_dengan_Pendekatan_Neo-Gramscian.pdf (518.5K)

Word count: 7550

Character count: 48980

GULEN MOVEMENT SEBAGAI COUNTER- HEGEMONY: MEMBACA KUDETA TURKI 2016 DENGAN PENDEKATAN NEO- GRAMSCIAN

Akhmad Rizqon Khamami

IAIN Tulungagung
rizqonkham@yahoo.com

Abstract

This article discusses a hegemonic project of Gulen Movement in Turkey. To read this hegemonic project does this article use a neo-Gramscian approach. The accumulation of Gulen Movement triggers a friction between Gulen Movement and the other existing hegemonic block, that of political Islam. The feud of these Islamic groups started when Gulen Movement makes use of an existing neoliberal system, both at the national and international levels, to build its accumulations on economy, social and politic sphere. The success of the accumulation grows Gulen Movement into a counter-hegemonic block which eventually triggered a Turkish coup 15 July 2016.

Keywords: Gulen, neo-Gramscian, Turkish coup, counter-hegemony.

Abstrak

Artikel ini mengupas proyek hegemoni Gulen Movement di negara Turki. Untuk membaca proyek hegemoni tersebut, artikel ini menggunakan pendekatan neo-Gramscian. Akumulasi kekuatan yang dilakukan gerakan ini menyebabkan gesekan antara Gulen Movement dengan blok hegemoni kelompok Islam politik. Perseteruan dua kelompok Islam ini berawal ketika Gulen Movement memanfaatkan sistem neoliberal, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk membangun akumulasi ekonomi, sosial dan politik. Keberhasilan ini menjadikan Gulen Movement sebagai hegemoni tandingan yang akhirnya memicu kudeta Turki 15 Juli 2016.

Kata kunci: Gulen, *neo-Gramscian*, kudeta Turki, hegemoni tandingan

Pendahuluan

Selama berlangsung drama kudeta militer di Turki tanggal 15 Juli 2016 nama Fethullah Gülen – tokoh pendiri Gülen Movement - mendadak mencuat, dan menjadi sosok kontroversial. Ia dituduh sebagai dalang kudeta. Salah satu penyebab tuduhan, karena Gülen Movement melakukan praktik infiltrasi (penyusupan) ke dalam tubuh militer, kepolisian, pengadilan dan lembaga negara lainnya. Menurut hemat penulis, tindakan tersebut sesungguhnya bukanlah infiltrasi, tetapi misi mengislamkan “pemegang jabatan” dengan cara menempatkan kader-kader terbaik dalam struktur birokrasi negara.

Ternyata, proyek hegemoni Gülen Movement tidak sebatas lembaga negara, tetapi juga dalam bidang ekonomi. Bahkan gerakan ini melakukan akumulasi dalam berbagai lapangan kekuatan. Mereka mendirikan lembaga keuangan, pendidikan, penerbitan, televisi, radio, perbankan dan bisnis lain di hampir semua lini. Kesuksesan ekonomi kelompok Islam kultural ini terlihat jelas pada masa-masa sebelum Kudeta 2016. Ketika itu Gülen Movement memiliki akses besar ekonomi dan menjadi kelompok berpengaruh di Turki. Di samping itu, mereka dengan sangat lentur mampu meleburkan diri ke dalam ekonomi dunia. Gerakan ini menjadi bagian integral sistem ekonomi neoliberal global.

Namun metode Gülen ini dilihat oleh pihak lawan sebagai proyek hegemoni Gülen Movement atas negara Turki. Tentu saja proyek hegemoni ini berbenturan dengan kelompok dominan yang sudah terlebih dahulu mapan, yaitu barisan Islam politik di bawah Presiden Recep Tayyip Erdoğan. Gülen mewakili Islam kultural, sedangkan Erdoğan merupakan representasi Islam politik. Perseteruan keduanya tidak lain adalah *war of position*, perebutan posisi. Puncaknya, konflik kedua kelompok Islam ini meledak menjadi kudeta 2016.

Sejauh ini sejumlah ilmuwan telah melakukan pembacaan terhadap kudeta Turki 2016 dari berbagai sudut pandang. M. Hakan Yavuz dan Rasim Koc (2016: 136-148) melihat bahwa

kudeta 2016 tidak lain adalah puncak dari perseteruan antara Erdogan dan Gulen dengan melibatkan kekuatan militer yang digerakkan oleh pengikut Gulen Movement. Sementara itu Caliskan (2016: 97-111) berargumentasi bahwa kemunculan kudeta 2016 tidak lain merupakan dampak dari demiliterisasi wilayah politik. Di tempat lain Siyaves Azeri (2016: 465-478) berpendapat bahwa kudeta 2016 merupakan bukti adanya kemunduran, dan sekaligus kegagalan politik Islam moderat di Turki. Adapun Zeyneb Cagliyan Icener (2016: 107-128) menilai bahwa kudeta 2016 bukan semata-mata kudeta militer, namun manifestasi dari struktur paralel di Turki yang dikenal dengan sebutan "*parallel state*". Sedangkan Francesco F. Milan (2016: 30) menduga bahwa kudeta 2016 merupakan reaksi atas kebijakan luar negeri Erdogan yang tidak merepresentasikan semangat Kemalis "*peace at home, peace in the world*" terutama keterlibatan Turki dalam konflik Suriah.

Berbeda dari para peneliti terdahulu, penulis berasumsi bahwa konflik antara Erdogan dengan Gulen yang berujung pada kudeta 2016 disebabkan oleh akumulasi ekonomi, politik dan sosial Gulen Movement. Akumulasi pada tubuh Gulen Movement menjadikan gerakan Islam kultural ini sebagai blok *counter-hegemony* yang kemudian menjadi sumber gesekan dengan blok hegemoni kelompok Islam politik. Dengan menggunakan *theoretical framework* neo-Gramscian, tulisan ini mencoba mengupas hal tersebut. Untuk itu, sebelum mengupas Gulen, akan dibahas terlebih dahulu kebijakan ekonomi di panggung nasional Turki agar kemunculan Gulen Movement sebagai *counter-hegemony* bisa terbaca dengan jelas.

Kelahiran Ekonomi Neoliberal di Turki

Kemunculan sistem ekonomi neoliberal di Turki tidak lepas dari kudeta militer tahun 1980. Kudeta ini merupakan titik penentu pergeseran kebijakan ekonomi Turki dari kapitalisme model Keynesian menjadi ekonomi neoliberal. Pemilihan kebijakan ini sejalan dengan arus neoliberalisme yang tengah melanda dunia. Neoliberal global saat itu sedang menata posisi

hegemoninya di pentas internasional melalui tangan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan dan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher. Dengan berdirinya badan keuangan internasional seperti International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia, gerakan neoliberal global mengokohkan diri sebagai satu-satunya blok hegemoni di muka bumi (Harvey, 2005: 10). Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Turgut Ozal, neoliberalisme menancapkan kaki di Turki dengan kokoh. Perdana Menteri yang kelak menjadi Presiden Turki ini sukses membawa negara Turki ke dekapan kapitalisme dunia.

Meski begitu, restrukturisasi ekonomi Turki tidak sepenuhnya berjalan mulus. Restrukturisasi mengalami fase transisi. Timbul perubahan relasi kuasa selama masa transisi. Dampak negatif relasi kuasa yang muncul antara lain: melemahnya daya beli rakyat Turki, pengetatan gaji pekerja, meningkatnya harga barang konsumsi, dan menurunnya produk pertanian. Semua ini—terutama kemerosotan bidang pertanian—menyebabkan reaksi berantai. Terjadi gelombang perpindahan penduduk dari desa ke kota dalam jumlah besar. Perpindahan penduduk ini berujung pada ledakan pengangguran di perkotaan.

Selain itu, restrukturisasi neoliberal menysar struktur distribusi yang mengancam kebangkrutan perusahaan kecil. Karena tidak memiliki cukup modal untuk bersaing dengan perusahaan internasional, perusahaan kecil Turki tidak mampu menembus ekspor, bahkan terancam bangkrut. Perusahaan berskala kecil ini kelak mengalami transformasi ideologi setelah mereka “diselamatkan” oleh beberapa gerakan Islam melalui program bantuan modal. Di kemudian hari mereka menjadi penyokong gerakan-gerakan Islam.

Masa transisi selama program restrukturisasi neoliberal di Turki juga memperlebar ketimpangan antar kelas sosial. Sehingga—meminjam istilah Hakan Yavuz (2003: 5) yang mengganti istilah “*opportunity*” dalam teori *new social movement* dengan istilah “*space*”—ketimpangan sosial ini membuka

space bagi Islam politik untuk berkembang. Partai Islamis berhasil memolitisir ketimpangan tersebut. Di samping memanfaatkan jurang kelas sosial sebagai jualan politik, partai Islamis juga memanfaatkan sistem birokrasi yang tidak berfungsi lancar. Kelak, berkat cara-cara tersebut partai Islamis memperoleh dukungan rakyat pada pemilu berikutnya.

Dalam sejarah Republik Turki modern, kelompok Islam politik tercatat beberapa kali berpeluang mengorganisir diri menjadi partai politik. Pada awal 1970-an berdiri partai bercorak Islam pertama dengan nama Milli Nizam Partisi (National Order Party) yang dibentuk oleh Necmettin Erbakan (1926-2011 M.). Partai ini berhasil mendudukkan dua utusannya di parlemen dan mendapat sokongan politik dari tarekat Naqsyabandiyah. Erbakan dikenal memiliki hubungan yang baik dengan tarekat ini sejak kuliah di Istanbul University. Setelah Milli Nizam Partisi (MNP) dibubarkan oleh militer selepas kudeta tahun 1971, Erbakan mendirikan Milli Selamet Partisi (National Salvation Party; NSP). Partai ini meraup sukses pada pemilu 1973 dengan perolehan suara 11,8%. Sehingga, 48 orang wakilnya melenggang ke Parlemen. Setelah itu, tak lama kemudian Erbakan menjadi Wakil Perdana Menteri. Karena kekacauan politik, muncul ketidak-stabilan. Lantas partai ini kehilangan kekuatan. Situasi ini berlanjut hingga lahir neoliberal di Turki. Partai Islamis selanjutnya bermetamorfosis menjadi Refah Partisi (Welfare Party).

Untuk pertama kalinya akses negatif neoliberalisme dimanfaatkan secara sempurna dalam setiap kampanye Refah Partisi. Partai Islamis ini memainkan peran sebagai penyalur bantuan finansial kepada rakyat miskin. Jalur birokrasi yang “lumpuh” dimanfaatkan sebaik-baiknya. Para aktivis Partai Refah mendistribusikan makanan, gas dan pakaian kepada keluarga yang membutuhkan. Mereka membantu mencarikan pekerjaan, dan bahkan membayari biaya sekolah dan biaya rumah sakit bagi yang tidak mampu. Bantuan finansial ini berasal dari sumbangan para pebisnis Muslim yang ikut

memperoleh keberkahan dari penerapan ekonomi neoliberal. Partai Refah memobilisir bantuan melalui lembaga amal dan organisasi di bawah partai ini. Ketimpangan sosial saat itu berhasil dimanfaatkan secara maksimal oleh Refah Partisi.

Partai Refah mengapitalisasi kondisi di atas sebagai salah satu strategi merebut hati rakyat. Partai yang digawangi oleh Erbakan ini memperoleh kepercayaan masyarakat. Partai Refah tidak saja sukses meraup dukungan dari rakyat di pedesaan dan dari pebisnis skala kecil, tetapi juga dari rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan (Patton, 2009: 441). Kesuksesan strategi ini melahirkan kemenangan partai Refah pada pemilu lokal tahun 1994 dan pemilu tingkat nasional pada 1995. Hasil pemilu ini selanjutnya –meminjam teori neo-Gramsci—menandai kelahiran blok hegemoni baru dari kalangan Islamis di pentas nasional Turki. Kelahiran sebuah blok hegemoni melalui pemilu, menurut penulis, merupakan hasil dari dialektis dan inter-subjektif sebagaimana teori neo-Gramscian, bukan seperti penafsiran hegemoni Marxisme ortodoks yang melihat hegemoni sebagai proses dari atas ke bawah oleh kelas dominan dengan anggapan masyarakat kelas bawah semata-mata sebagai penonton atau partisipan pasif dalam proses sejarah.

Hegemoni Kelompok Islamis Turki

Sejak munculnya keterbukaan pasar sebagai akibat perubahan kebijakan sistem ekonomi Turki dengan adopsi pasar bebas dan ikut arus ekonomi neoliberal global pada tahun 1980 berdampak terbukanya peluang bagi pemain baru dari kalangan Muslim religius. Selama ini kue ekonomi hanya dinikmati kalangan sekular di bawah bendera organisasi TUSIAD (Turkish Industrialist and Businessmen Association; Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği). Para pebisnis sekular mendapat perlakuan istimewa dari rezim Atatürk. Namun penerapan ekonomi neoliberal membuka ruang akses ekonomi bagi kelompok Islam yang selama ini terpinggirkan. Peminggiran itu telah berlangsung lama, yaitu sejak Turki

merdeka hingga tahun 1980 – tepatnya, selama era ekonomi tertutup.

Semangat *entrepreneurship* lahir di kalangan Muslim Turki bersamaan dengan lahirnya atmosfer pasar bebas. Secara umum dapat dikatakan bahwa kehadiran neoliberalisme merupakan berkah bagi masyarakat Muslim Turki, baik Islam politik maupun Islam kultural. Ruang ekonomi semakin terbuka, sehingga memudahkan kelompok Islam untuk ikut bermain dalam percaturan ekonomi. Namun, keterbukaan ekonomi ini memunculkan pertanyaan. Dari mana diperoleh modal untuk pengembangan usaha kelompok Islam ini? Kebutuhan modal usaha dipastikan berjumlah amat besar, terutama jika kelompok Islam ingin bersaing dengan kelompok sekular.

Untuk mengatasi persoalan dana tersebut beberapa gerakan Islam melirik para imigran Turki di Eropa. Mereka mencari sumber keuangan dari diaspora Turki. Berbagai gerakan Islam Turki mendorong diaspora Muslim Turki agar mengalihkan uang mereka ke dalam negeri untuk memodali para pengusaha Muslim lokal guna menyaingi kelompok sekular Turki yang memiliki hubungan erat dengan pemilik modal Barat. Kelompok agama di Turki melakukan mobilisasi keuangan dari diaspora Turki melalui berbagai saluran seperti proyek investasi, tawaran bank di Turki dengan bunga yang lebih tinggi dibanding bank-bank Eropa, serta jalur *infaq* dan *sadaqah*.

Turki adalah pemasok tenaga migran terbesar ke berbagai negara Eropa, terutama Jerman. Menurut hasil penelitian Pusat Riset Turki (TAM Association) pada tahun 2007 jumlah orang Turki yang tersebar di negara-negara Uni Eropa berkisar 4,2 juta orang. Riset ini juga mengungkapkan bahwa 42,1% imigran Turki telah meleburkan diri menjadi warga negara setempat (Karatas, 2012: 29). Salah satunya adalah Mesut Ozil, seorang pemain bola nasional Jerman. Mereka bukan lagi bangsa Turki yang tinggal di Jerman, tetapi orang Jerman yang beretnis Turki. Masuknya imigran Turki ke negara-

negara Eropa dimulai sejak adanya kesepakatan tenaga kerja yang ditandatangani pada tahun 1961 antara Turki dan Jerman. Waktu itu Jerman sedang melakukan pembangunan besar-besaran selepas Perang Dunia II.

Tercatat, keseluruhan jumlah keluarga beretnis Turki di Eropa sekitar 1.054.000 rumah tangga. Total tabungan diperkirakan menyentuh 4,2 milyar Euro setiap tahunnya (Karatas, 2012: 30). Data statistik sebagaimana dikutip oleh Birkan Karatas menyebutkan bahwa *remittance* (pengiriman uang) tenaga kerja Turki dari Jerman menempati 80% dari keseluruhan *remittance* yang datang dari negara-negara di seluruh dunia. Selama satu dasawarsa, antara tahun 1970-an hingga 1980-an, total *remittance* mencapai 4% GDP Turki. *Remittance* dari Jerman sendiri menempati 3% GDP Turki. Selama tahun 1964 hingga 2005, *remittance* pekerja Turki dari Jerman berjumlah 47,5 milyar Euro (Karatas, 2012: 30). Jumlah fantastis tersebut merupakan berkah bagi kelompok Islam Turki di dalam negeri yang sedang mencari modal segar.

Remittance dari tenaga kerja migran Turki ke dalam negeri memainkan peran penting dalam membantu pertumbuhan ekonomi negara ini. Dukungan modal dari masyarakat Muslim internasional ini dimanfaatkan dengan positif. Aliran modal dipergunakan untuk mendirikan perusahaan seperti *Sayha*, *Edustri*, *Kombassan*, *Ittifak*, *Jet-Pa* dan *Buyuk Anadolu Holding*. Sejak itu tercipta hubungan erat antara modal keuangan internasional dengan masyarakat Muslim Turki yang selama ini hanya diisi oleh para pemilik modal dari kelompok sekular.

Jika selama ini kelompok Islam terpinggirkan, berkat adanya *space* pada akhirnya mereka berhasil menjadi kekuatan penyeimbang bagi kelompok sekular. Mereka membentuk sebuah asosiasi pebisnis yang diberi nama MUSIAD (Mustakil Sanayici ve Is Adamlari Dernegi) (Yavuz, 1999: 585). Sejak organisasi ini berdiri, barisan Muslim Turki semakin kokoh. Pada saat sistem neoliberal mengeluarkan deregulasi penyiar-

an, gerakan Islam serta-merta mendirikan stasiun radio, televisi, koran dan media massa lainnya. Deregulasi ini membuka kesempatan bagi berbagai kelompok Islam untuk berkontestasi menyebarkan ideologi masing-masing.

Sejak itu kelompok religius tampil di panggung nasional Turki. Mereka menjadi orang kaya baru dengan orientasi keagamaan yang kental. Kelompok religius berhasil melahirkan pebisnis dan orang kaya baru yang dikenal dengan istilah "Anatolian Tigers" (orang-orang kaya dari wilayah Anatolia). Anatolian Tigers merupakan pebisnis berskala kecil dan menengah di wilayah tersebut. Jika selama ini kebanyakan perusahaan dan industri berlokasi di Marmara dengan alasan karena kemudahan transportasi, kondisi tanah dan kedekatan dengan kota metropolitan Istanbul, maka sejak menggulingkannya neo-liberal bermunculan kota-kota industri di wilayah Anatolia seperti Sanliurfa, Denizli, Gaziantep, Corum dan Kahramanmaraş. Meskipun mereka tidak mendapat subsidi dari pemerintah, perusahaan-perusahaan kecil dan menengah ini berkompetisi memperebutkan pasar ekspor.

Karakteristik yang dapat kita tandai dari orang kaya baru Anatolia antara lain: memegang teguh nilai religiusitas, terbuka dengan perubahan, menyokong partai politik Islam atau menyokong gerakan Islam kultural dengan tetap tidak mengesankan diri sebagai bagian dari partai atau gerakan tersebut, menentang campur tangan negara dalam perputaran pasar dan ekonomi, dan menaruh prioritas utama pada pendidikan anak-anak dengan mendirikan sekolah-sekolah swasta berkualitas tinggi yang berorientasi pada pendidikan keagamaan. Akses besar ekonomi yang mereka nikmati pada gilirannya mendorong kelompok Islam -baik Islam politik maupun Islam kultural- menjadi gerakan yang disegani di wilayah sosial keagamaan. Kedua wilayah ini kelak menjadi ruang kontestasi bagi kelompok-kelompok Islam untuk menanamkan ideologi keagamaan masing-masing. Dua kelompok religius yang paling menonjol adalah Milli Gorus dan Nurcu. Milli

Gorus melahirkan AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) dengan tokoh Recep Tayyip Erdoğan, dan Nurcu melahirkan Gulen Movement dengan tokoh *Hocaefendi* Fethullah Gulen.

Partai Refah (Refah Partisi—RP) besutan Necmettin Erbakan memenangi pemilu dengan perolehan suara 21,38% pada 1995. Konfrontasi terus-menerus terjadi di panggung politik antara Erbakan melawan kelompok sekular Turki, terutama pihak militer. Akibatnya, kalangan Muslim yang pro-globalisasi dan yang mengandalkan ekspor luar negeri menjadi terpinggirkan dari percaturan ekonomi (Patton, 2009: 442). Terpinggirkannya pengusaha Muslim disebabkan, terutama, oleh orientasi Erbakan yang “meninggalkan” Barat dan lebih banyak menoleh ke dunia Timur (negara-negara Muslim) saat ia menjadi perdana menteri. Para pebisnis religius Turki teralienasi dari pasar internasional. Mereka yang merasa teralienasi dan kecewa lalu berkumpul di bawah kendaraan baru, yaitu partai politik AKP.

Di mata kelompok sekular dan militer, kemenangan Refah Partisi ini menggusarkan. Kelompok sekular bermaksud membersihkan pengaruh kelompok Islamis (Yavuz, 2000: 21-43). Dewan Keamanan Nasional (Milli Güvenlik Kurulu—MGK) menggoyang pemerintahan koalisi Erbakan dengan alasan mempertahankan sekularisme. Pemerintahan Refah Partisi dipaksa harus membubarkan diri. Partai Refah dinyatakan sebagai partai terlarang. Necmettin Erbakan dilarang ikut dalam pemilu selama lima tahun berikutnya.

Meskipun memenangi pemilu 1995 dan membentuk pemerintahan koalisi, akhirnya Partai Refah jatuh dari kekuasaan seiring memorandum militer pada tanggal 22 Februari 1997. Pelarangan Partai Refah berdampak pada perpecahan di kalangan pengikut Erbakan. Mereka terbelah menjadi dua kelompok dengan masing-masing mendirikan partai Islam yang berbeda: Felicity Party (Saadat Partisi—FP) yang masih mempertahankan warna Islamis murni, dan Justice and Development Party (Adalet ve Kalkınma Partisi—AKP) yang mengadopsi

warna Islamis dengan menganut neoliberalisme. Perubahan dari warna Islamis murni menjadi terbuka terhadap prinsip-prinsip neoliberal mendapat sematan dari Asef Bayat dengan istilah “*post-islamic turn*” (Bayat, 2007: 6).

Adopsi kelompok Islamis -melalui AKP- pada neoliberalisme membuktikan bahwa neoliberalisme meneguhkan dominasi di Turki. Neoliberalisme juga melakukan reformasi pada lembaga negara, restrukturisasi ekonomi, memperlemah gerakan buruh –baik dalam tataran politik maupun gerakan sosial- dan menciptakan budaya konsumerisme dan semangat kompetisi di tengah masyarakat Turki. Pada saat yang sama, kegagalan kelompok sekular –dengan bubarnya pemerintahan koalisi nasionalis-konservatif-liberal yang dimotori oleh Motherland Party (ANAP)- melahirkan krisis hegemoni di Turki. Krisis hegemoni ini selanjutnya menjadi pintu masuk AKP untuk merebut dominasi politik pada tahun 2002.

Hegemoni Erdogan dan AKP

AKP memenangi pemilu pada tahun 2002 dengan perolehan 34,3% suara. AKP berhak membentuk pemerintahan. Kelompok Islam politik ini akhirnya mendapat kesempatan melakukan konsolidasi hegemoni. Kemenangan AKP ini menjadi penanda berakhirnya fase krisis hegemoni kelompok sekular. Spektrum politik Turki seketika berubah. Pertanyaan yang muncul, bagaimana kemenangan ini dapat diraih? Menurut hemat penulis, karena kelompok Islam politik berhasil memanfaatkan momentum krisis hegemoni –terutama krisis ekonomi— sebagai alat untuk mendulang suara.

Krisis hegemoni yang menjadi pintu masuk kelompok Islam politik ke panggung nasional Turki sesungguhnya meliputi tiga krisis sekaligus: pertama, krisis akumulasi (rezim sekular terlalu bergantung pada industrialisasi yang bersubstitusi impor); kedua, krisis representasi politik (tidak adanya rasa keterwakilan masyarakat religius akibat kosongnya partai agama yang bisa mewakili suara mereka); ketiga, krisis hegemoni (kelompok borjuis gagal mendapat dukungan masyarakat lapis

bawah). Pada akhirnya ketiga krisis ini melahirkan krisis organik yang meluas. Gerakan Islam yang selama ini dipinggirkan oleh rezim Kemalis memiliki peluang ikut bermain di kancah politik nasional Turki. Kelompok Islam tampil sebagai pemain dengan mengusung legitimasi pembawa nilai-nilai agama. Selain itu, gerakan Islam diuntungkan dengan adanya konsep sintesis antara Islam dan Turki yang diadopsi sebagai ideologi resmi negara pasca kudeta militer tahun 1980 yang dikenal dengan istilah “Turkish Islam”.

Setelah AKP memenangi pemilihan umum pada tahun 2002, kemakmuran ekonomi menghantarkan AKP mengantongi 46,5 persen suara pada pemilu 2007 (Baskan, 2010: 176-7). Penampilan yang mengesankan selama lima tahun memimpin mendorong partai ini mendapatkan lebih banyak kepercayaan masyarakat pada pemilu 2011 dengan jumlah suara hampir 49,8%. Disebabkan adanya tuduhan korupsi dalam lingkaran pemerintahan Erdogan, AKP mengalami kemerosotan kecil pada pemilu Juni 2015 dengan hanya meraup suara 40,9%. Akan tetapi konsolidasi hegemoni di tubuh AKP sebagai respon atas kemerosotan suara ini mampu menyibak kembali kemenangan pada pemilu November 2015 dengan suara 49,5% (Carkoglu dan Yildirim, 2015: 59).

Pada masa pemerintahan pertama AKP, antara tahun 2002 hingga 2006, pertumbuhan ekonomi mencapai 7,2 persen setiap tahunnya. Turki berhasil menjadi salah satu dari 6 negara kaya baru di pentas internasional, dan masuk jajaran raksasa baru ekonomi yang dikenal dengan istilah BRICTIn (Brazil, Rusia, India, Cina, Turkey dan Indonesia). Menurut International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia (World Bank) Turki merupakan negara terkaya di dunia nomor urut 17 (IMF 2016). Rakyat Turki saat ini sedang menikmati kemakmuran di bawah Erdoğan dan pemerintahan AKP. Posisi ekonomi ini menghantarkan Turki menjadi anggota kelompok elit dunia, G20.

Terhitung sejak memenangi pemilu 2002 Erdoğan sudah mengendalikan kekuasaan selama 15 tahun. Pertanyaannya, apa di balik kemenangan ini? Peneliti menghadirkan beberapa jawaban. Pertama, dengan belajar dari para pendahulunya - Erbakan dan partai Refah, atau menghindari intervensi militer- AKP tidak mengadopsi retorika anti Barat. Sebaliknya, AKP mendeklarasikan diri sebagai pejuang demokrasi serta menolak ideologi Islam radikal. Kemenangan AKP dalam lima pemilu berturut-turut (2002, 2007, 2011, 2015 [Juni], 2015 [November]), menurut penulis, karena perubahan dalam tubuh partai, dari semula berwajah Islamis kaku menjadi partai yang lebih akomodatif terhadap sistem ekonomi neoliberal, sekulerisme, demokrasi dan pluralisme.

Jawaban kedua, Erdogan menerapkan kebijakan populis. AKP mendapatkan dukungan suara dari masyarakat lapis bawah karena membagi-bagikan bantuan sosial. Strategi populis yang dilakukan oleh partai Islam ini merupakan unsur paling penting dalam proyek hegemoni AKP. Sebagai cara lain konsolidasi hegemoni, retorika Erdogan berisi penegasan bahwa dirinya adalah penyambung lidah rakyat. Erdogan merangkul segmen masyarakat bawah untuk melawan hegemoni kekuatan politik penguasa sebelumnya, yaitu kelompok sekular. Erdogan membuat dikhotomi antara “kita” dan “mereka”, dengan “kita” merujuk pada kelompok Islam politik, dan “mereka” merujuk pada kelompok sekular. Dalam spektrum sejarah Turki, polarisasi politik selalu terjadi antara negara dan masyarakat sipil. Yaitu, kekuatan birokrasi Kemalis *vis a vis* kelompok religius yang selama ini dipinggirkan, ditindas dan dianggap sumber kemunduran bangsa Turki (*irtija'*) oleh elit Kemalis. Spektrum ini dimanfaatkan oleh AKP dengan istilah “kita” dan “mereka”.

Sejarah Turki dipenuhi dengan kudeta militer. Namun jamak dipahami di kalangan pengamat dan ilmuwan bahwa pengaruh Angkatan Bersenjata Turki mulai melemah sejak tahun 2000-an akibat dari keinginan Turki bergabung ke dalam

Uni Eropa. Selain itu juga sebagai akibat keberhasilan hegemoni dan dominasi kelompok Islam. Meski begitu, dengan perolehan 46,5% suara pada tahun 2007, langkah AKP untuk menguasai apparatus negara menghadapi resistansi dari pihak militer dan kelompok sekular, sehingga AKP beraliansi dengan sesama kelompok Islam –Gülen Movement. Tetapi memasuki tahun 2010, dengan keberhasilan “mengkandangkan” kembali tentara ke barak dan “berhasil” mendominasi struktur negara, Turki memasuki era baru. Islam memasuki wilayah publik. Beberapa proyek Islamisasi berkembang, di antaranya: Islamisasi pendidikan dan menghapus pelarangan jilbab bagi perempuan di ranah publik.

Kendati demikian, otoritarianisme menjadi salah satu pilar proyek hegemoni populis kelompok ini selama periode konsolidasi hegemoni. Berdalih untuk mencegah kudeta militer, Erdogan mempraktikkan cara-cara otoriter. Pertama, AKP menjarakan politisi lawan serta melakukan *pressure* terhadap media. Kedua, Erdogan melakukan pengetatan dunia maya dengan mendirikan Telecommunication and Communication (TIB) sebagai lembaga pengawas dan pengendali internet.

Meskipun TIB tidak diberi kekuasaan otonom, namun badan ini diberi kewenangan untuk mengatur internet dan membatasi komunikasi online. Jika ditemukan ada pelanggaran pada sebuah situs, maka TIB bisa segera menutup, dan pengadilan memidanakan pemilik situs. Data yang dikeluarkan TIB pada tahun 2010 memperlihatkan bahwa 70% pemblokiran terkait dengan pornografi, sementara seperempat dari jumlah tersebut berkaitan dengan pencabulan anak-anak. Tercatat hingga April 2012, lebih dari 500.000 laporan yang masuk ke TIB menyebutkan bahwa sekitar 85% pelanggaran internet terkait dengan pornografi, prostitusi dan pencabulan anak-anak. Pemfilteran internet mendapat reaksi beragam dari masyarakat. Para pengguna internet menjuluki kebijakan ini sebagai kebijakan tangan besi. Meskipun pengetatan internet berdalih untuk membatasi pornografi, namun penulis melihat kebijakan

ini sebagai cara Erdogan mempertahankan dominasi kelompok Islam politik dengan cara otoriter.

Tiba-tiba pada tahun 2011 sebuah demonstrasi besar meledak. Demo ini merebak hingga ke kota-kota besar, dan menyebar hampir serentak ke seluruh negeri. Di Istanbul sendiri diperkirakan 20 ribu orang ikut berdemo di Taksim Square. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak muda. Sesungguhnya demo ini merupakan respon terhadap sikap otoriter Erdogan. Erdogan bereaksi dengan semakin mengetati pengawasan terhadap dunia maya. Dua tahun kemudian, anak-anak muda ini kembali menggelar demo lebih besar yang mengejutkan dunia: demonstrasi Gezi Park.

Demonstrasi Gezi Park awalnya dimaksudkan untuk memprotes tindakan Erdogan yang akan merubah taman Gezi menjadi bangunan mall. Demonstrasi Gezi yang terjadi pada tahun 2013 ini kelak menjadi salah satu dari dua kejadian politik yang menggoyang pondasi partai AKP. Demo Gezi adalah demo terbesar yang pernah dihadapi oleh AKP karena mendapat dukungan dari hampir semua lapisan masyarakat serta peliputan intens media asing.

Berita tentang perlakuan eksessif polisi terhadap para demonstiran tiba-tiba menyeruak di dunia maya. Berkat dunia internet, perlakuan brutal polisi terhadap demonstiran tersebar secara online dalam bentuk video, berita, gambar dan artikel. Berita ini selanjutnya menjadi bola salju. Konon tidak kurang dari 2 juta tweet berseliweran pada tanggal 1 Juni 2013. Menariknya, selama kejadian tersebut media mainstream tidak meliput, justru menyalahkan para demonstiran. Sehingga media ini di kemudian hari menjadi sumber ejekan masyarakat.

Tewasnya demonstiran pada demonstrasi Gezi Park menjadi sorotan banyak orang. Erdogan menjadi pusat kritik. Namun polisi semakin repressif. Pemerintah AKP menangkapi para pengkritik Erdogan dengan leluasa. Seorang pembaca acara di stasiun TV milik Gulen Movement menghadapi 8 tahun penjara karena dakwaan menghina presiden. Seorang siswa berusia 15

tahun dituntut dengan dakwaan yang sama. Seorang aktivis LGBT diinvestigasi karena mencuitkan lelucon gay tentang Erdogan di Twitter. Seorang anggota partai oposisi ditangkap karena mengkritik Erdogan dan AKP di Facebook. Erdogan memblokir media sosial. Twitter diblokir selama 14 hari. Satu minggu kemudian, Youtube juga diblokir selama satu bulan.

Erdogan bersikap keras terhadap para demonstran. Ia menyebut demonstrasi Gezi Park sebagai upaya kudeta dari kekuatan internasional dan faksi sekular Kemalis yang sedang bekerja sama untuk menjatuhkan pemerintahan AKP. Erdogan menuduh rencana kudeta tersebut sudah dirancang dengan matang. Ia menyebutnya sebagai “kudeta sipil”. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa di tangan Erdogan demonstrasi Gezi Park diartikulasikan sebagai isu kudeta dalam proyek hegemoni populis AKP.

Krisis Gezi mencapai titik kulminasi sesaat setelah kritikan datang dari Fethullah Gulen. Media massa milik Gulen Movement mem-*blow up* berita Gezi Park, terutama menyoroti pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim Erdogan. Reaksi Erdogan amat keras. Tak lama kemudian Erdogan menutup seluruh sekolah swasta dengan maksud mematikan aktivitas pendidikan Gulen Movement. Tindakan Erdogan ini mendapat kritikan dari masyarakat luas karena berdampak pada penutupan semua sekolah swasta di seluruh negeri, bukan hanya sekolah Gulen. Penutupan sekolah swasta berarti, hampir lima ribu sekolah swasta ditutup paksa, dan 50 ribu tenaga pendidikan akan kehilangan pekerjaan. Kendati demikian Erdogan tidak bergeming sedikit pun.

Sejumlah anak menteri pemerintahan AKP ditahan polisi atas tuduhan korupsi. Polisi penangkap ini diduga berafiliasi dengan Gulen Movement. Perdana Menteri Erdogan segera menghentikan investigasi korupsi ini karena dipastikan anak-anak Erdogan akan ikut terseret. Waktu itu bukti rekaman keterlibatan Erdogan dan keluarganya telah bocor ke publik. Diduga rekaman itu sengaja dibuat secara diam-diam oleh

pengikut Gulen Movement yang berada di struktur kelembagaan negara. Dalam salah satu rekaman, Erdogan terdengar sedang mengarahkan anaknya untuk memindah tumpukan uang di rumah mereka. Di kesempatan lain, terdengar instruksi Erdogan untuk merubah isi siaran *channel-channel* TV. Bahkan Erdogan memerintahkan agar memanipulasi hasil polling untuk kepentingan partainya. Terkuak dalam rekaman lain, untuk menjalankan operasi militer di Syria, badan intelejen negara diperintahkan untuk mengarahkan roket milik negara Turki ke wilayah Turki sendiri untuk dijadikan alasan penyerbuan ke Syria.

Erdogan semakin otoriter (Muedini, 2016:99-122). Referendum yang diadakan pada tanggal 12 September 2010 dengan maksud untuk perbaikan demokrasi di Turki, namun pada kenyataannya –dengan dukungan suara 58% rakyat- referendum ini malah menjadi otoriterianisme, bukan demokratisasi seperti yang dijanjikan. Sejak saat itu peradilan berada di bawah kontrol kekuasaan eksekutif. Penangkapan aktivis politik dan kontrol terhadap media memperoleh pembenaran. Sikap otoriter Erdogan semakin menjadi-jadi dengan disahkannya undang-undang keamanan nasional setelah insiden Gezi Park.

Berkat dukungan suara mayoritas dalam pemilu November 2015, AKP menjadi penguasa tunggal tanpa perlu berkoalisi. Erdogan berhasil membangun sebuah desain negara baru di Turki, yaitu rezim presidensial. Setelah sukses menegakkan hegemoni satu-satunya, Erdogan dan kelompok Islam politik semakin memperkokoh kontrol terhadap lembaga negara. Untuk memperlancar konsolidasi kekuasaan, mereka memberangus apapun bentuk oposisi. Bahkan pilar utama dominasi Erdogan adalah otoriterianisme.

Sejak pemerintah AKP memberangus demonstrasi Gezi pada tahun 2013, arah demokrasi berubah buruk, terpasungnya kebebasan bersuara, lemahnya penegakan hukum dan macetnya kebebasan media. Rangking Turki dalam penanga-

nan korupsi merosot. Berikut ini beberapa daftar problem yang dihadapi Turki: tingginya inflasi, merosotnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pembiayaan fiskal, tingginya angka pengangguran, menumpuknya hutang negara, dan menurunnya daya saing ekspor. IMF mencatat pertumbuhan ekonomi Turki untuk tahun 2015 dan 2016 masing-masing hanya mencapai 3 persen. Sejak awal 2015, mata uang lira mengalami kemerosotan nilai tukar dibanding mata uang asing sebesar 10 persen.

Pemerintahan Erdogan mengabaikan reformasi struktural yang diperlukan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan Turki jangka panjang. Salah satu problem paling mendasar dalam struktur Turki adalah ketergantungan yang sangat besar terhadap investasi asing. Ketergantungan Turki pada arus modal luar negeri dianggap sudah melampaui batas normal. Begitu juga defisit yang harus ditanggung Turki pada akhir tahun 2014, yaitu sebesar 6 persen GDP. Hal ini membuat Turki rentan terhadap guncangan ekonomi dari luar. Kelemahan ini juga yang menyebabkan *Morgan Stanley* menempatkan Turki sebagai salah satu negara yang rentan mengalami kemerosotan ekonomi. Banyak orang menduga defisit yang ditanggung Turki saat ini berkisar 5-6. Sejak kasus korupsi merebak pada tahun 2013, Turki berubah menjadi negara yang dipenuhi dengan *headlines* tentang cerita melambatnya ekonomi serta berita rentannya finansial.

Selain itu, kendati ekonomi Turki sedang melambat, Erdogan memimpikan berdirinya proyek raksasa “monumen” yang menyedot biaya tinggi. Dalam beberapa tahun mendatang Istanbul akan memiliki airport terbesar di dunia. Erdogan berencana membangun jembatan raksasa melintasi Bosphorus. Saat ini sedang dibangun sebuah masjid besar yang dapat dilihat dari setiap sudut Istanbul. Masjid ini direncanakan memiliki menara tertinggi di dunia. Para pengkritik mengecam pembangunan tersebut. Mereka menilai, proyek tersebut dilakukan tanpa perencanaan yang matang, cenderung

serampangan dan merusak lingkungan. Jembatan yang direncanakan akan di bangun di atas Bosporus memangkas hutan yang selama ini menjadi jantung ekologi Istanbul.

Problem ekonomi dan sikap otoriter Erdogan di atas melahirkan krisis hegemoni kelompok Islam politik. Sehingga, *space* ini memungkinkan kemunculan blok hegemoni tandingan (*counter-hegemony*) dari kelompok Islam kultural, yaitu Gulen Movement.

Gulen Movement sebagai *Counter-Hegemony*

Sejak pemberlakuan neoliberalisme di Turki pada tahun 1980-an, Gulen Movement meleburkan diri ke dalam sistem ekonomi ini baik di panggung nasional Turki maupun dunia internasional. Gulen tidak menolak sistem ekonomi neoliberal seperti halnya kelompok Salafi dan kelompok revivalis di belahan dunia Islam lainnya. Gerakan ini justru merangkul sistem ekonomi neoliberal di tengah penolakan kelompok Islam kanan tersebut. Bahkan Gulen mengadopsi prinsip-prinsip neoliberal seperti demokrasi, HAM dan pluralisme. Kemampuan melebur Gulen Movement ke dalam sistem neoliberal – berikut kesuksesan akumulasi ekonominya- merupakan kepiawaian gerakan ini mengadopsi mekanisme pasar, dan kelihaihan mengadopsi prinsip kerja kapitalisme, yaitu *enterpreneurship*. Prinsip Gulen tidak lahir dengan tiba-tiba, tetapi tidak lain merupakan bentuk pengembangan dari ajaran Nursi.

Said Nursi, bapak pendiri gerakan Nurcu, memformulasikan cara baru mendefinisikan Islam ke tengah masyarakat Turki yang telah dipengaruhi epistemologi filsafat materialisme sejak Kemal Ataturk mendirikan Republik Turki modern. Formulasi Nursi ini merupakan reaksi terhadap modernisasi yang diterapkan secara paksa oleh Kemal Ataturk. Meskipun oleh kelompok Ataturk dituduh *irtija'* (kolot; terbelakang), gerakan Nurcu sesungguhnya adalah gerakan Islam yang berpikiran maju. Ajaran Nursi didasarkan pada prinsip mengambil hal-hal baik dari peradaban Barat –misalnya industri, ilmu pengetahuan dan lainnya.. namun membuang

sisi buruknya seperti filsafat materialisme dan ateisme. Prinsip Nursi ini juga berlaku pada bidang ekonomi.

Said Nursi menulis *Iktisad Risale-i* (Risalah tentang Ekonomi). Buku ini membahas interaksi Islam dengan pasar dan ekonomi. Ada tiga alat produksi ekonomi menurut Nursi, yaitu: industri, pertanian dan perdagangan. Industri sebagai alat yang memberi makna pada sumber daya alam yang masih mentah. Lanjut Nursi, semestinya seluruh sumber daya alam didistribusikan dengan baik, sehingga tercipta keseimbangan antara sumber daya dengan kebutuhan umat manusia. Sistem ekonomi yang paling baik, masih menurut Nursi, adalah sebuah sistem yang mampu menciptakan keseimbangan. Sedangkan pertanian, sebagai alat produksi kedua, adalah sektor krusial karena pertanian berfungsi sebagai penyedia sumber makanan bagi umat manusia. Adapun perdagangan merupakan aktivitas ekonomi yang memberi makna pada produksi, khususnya pertanian.

Adapun jasa keuangan dan perbankan, menurut Nursi, hendaknya dihindari karena industri perbankan memakai riba dalam setiap transaksi keuangan. Semua transaksi dengan cara riba tidak dibenarkan Islam. Transaksi riba bisa berdampak munculnya ketidak-adilan. Sedangkan ekonomi yang tidak adil akan melahirkan konflik dan peperangan. Ungkapan Nursi yang terkenal, "*In order to close the door of fights, close the door of banks*", jika ingin menghapus peperangan, hindarilah transaksi perbankan (Karatas, 2012: 21). Jadi, pandangan Nursi tentang ekonomi berisi: *pertama*, hindari transaksi yang melibatkan bunga bank. *Kedua*, jika terpaksa membutuhkan modal, dana halal dapat diperoleh dari *zakat*, *infaq* dan *sadaqah* umat Islam. Cara halal ini merupakan alternatif untuk menghindari riba. *Ketiga*, manusia hendaknya menjauhi sikap boros dan berlebih-lebihan.

Jika kita lihat secara sepintas, ajaran Said Nursi di atas tampak berseberangan dengan aturan dasar kapitalisme dan neoliberalisme kontemporer. Kendati demikian, kita tidak bisa

mengatakan bahwa Nursi menentang kapitalisme dan neoliberalisme. Satu hal yang harus selalu diingat, prinsip Nursi adalah menerima sisi positif, dan menolak aspek negatifnya. Pemikiran ekonomi Said Nursi bukanlah kapitalisme, dan bukan pula sosialisme. Ia memiliki warna tersendiri. Ia menerima aspek positif dari sistem ekonomi neoliberal, tetapi menolak sisi negatif sistem ekonomi tersebut. Misalnya, Nursi menerima sistem pengupahan dalam kapitalisme, tetapi menolak konsumsi berlebihan. Alasannya, sikap boros dan konsumtif dapat merusak nilai moral masyarakat.

Begitu pula sikap Nursi terhadap sistem ekonomi sosialisme. Nursi bersedia menerima aspek positif sosialisme karena aliran ekonomi ini tidak mendorong masyarakat menjadi konsumtif, namun ia menolak sosialisme karena sosialisme membuat orang terlalu menggantungkan segala sesuatunya kepada negara. Ketergantungan kepada negara menyebabkan seseorang menjadi stagnan, tidak memiliki jiwa *entrepreneur*, dan tidak memiliki jiwa kompetitif.

Sepeninggal Said Nursi, gerakan Nurcu terpecah menjadi beberapa cabang. Salah satu pecahan adalah Gulen Movement (Yavuz, 2003a:15-18). Pemikiran Fethullah Gulen, menurut Hakan Yavuz (1999: 592), tidak lain adalah kelanjutan dari pemikiran Said Nursi yang berkeinginan memadukan Islam dan modernitas. Gerakan ini menempatkan diri sebagai gerakan dakwah yang berkeinginan meningkatkan kesadaran individu terhadap Islam. Mereka mengintegrasikan modernitas ke dalam kesadaran Muslim (Yavuz, 1999: 585-6). Gerakan ini melempangkan jalan modernitas, membuang hambatan yang menghalangi integrasi antara Islam dan dunia kontemporer – termasuk berdamai dengan neoliberalisme.

Aktivitas dakwah gerakan Nurcu bukanlah di wilayah politik, tetapi di wilayah kultural. Salah satu strategi dakwah Nurcu dalam melakukan transformasi pada masyarakat adalah transformasi di tataran individu. Jika Nursi memfokuskan diri pada penguatan keislaman di tingkat individu, maka Gulen

menggeser fokus dakwah menjadi penguatan sosial (Yavuz, 2003a: 9). Meskipun Gülen masih meneruskan prinsip dakwah kultural Nursi, Gülen Movement mengalami pergeseran sejak Turki mengadopsi ekonomi neoliberal. Berbeda dari Nursi yang berhati-hati dengan segala sesuatu dari Barat, Gülen tegas-tegas menyokong integrasi umat Islam ke dalam sistem ekonomi neoliberal.

Gülen mengembangkan pemikiran ekonomi yang menitikberatkan pada persesuaian Islam dengan zaman modern. Gülen Movement membawa misi keseimbangan antara ajaran Islam dengan identitas sekular di tengah atmosfer ekonomi neoliberal. Keseimbangan ini merupakan kombinasi unik yang menjadi penciri Gülen Movement. Meskipun Yavuz menyebut Gülen Movement sebagai “neo-Nurcu Movement”, tetapi Gülen melakukan inovasi. Gülen mendorong pengikutnya untuk mendirikan perusahaan dan berbisnis. Mereka didorong untuk berperan aktif dalam perputaran pasar dan ekonomi di tengah kebijakan privatisasi Turki. Gülen Movement menceburkan diri ke dalam sistem kapitalis modern.

Berkat dorongan Gülen, para pengikut yang tergabung dalam Gülen Movement ikut berperan dalam menggerakkan ekonomi Turki. Mereka berhasil membangun kerajaan bisnis dan melakukan akumulasi ekonomi. Hakan Yavuz (1999: 596) mendata sejumlah keberhasilan ekonomi Gülen Movement antara lain, gerakan ini menguasai kerajaan media massa. Di antara media massa tersebut adalah *Sizinti* (majalah bulanan tentang sains), *Ekoloji* (majalah tentang ekologi), *Yeni Umit* (jurnal keagamaan), *Aksiyon* (majalah mingguan), *Zaman* (koran harian), *The Fountain* (majalah berbahasa Inggris), *Samanyolu TV*, dan *Burc FM*. Gerakan Gülen juga menguasai lembaga keuangan, yaitu *Asya Finans*. Selain itu gerakan Gülen memiliki asosiasi pengusaha, *ISHAD* (*Is Hayati Dayanisma Dernegi*) yang memiliki anggota lebih dari 2000 pebisnis. Para pebisnis ini adalah donator dan penyokong aktivitas dakwah Gülen.

Bagaimana Gulen Movement melakukan akumulasi ekonomi sehingga terbangun dengan kokoh? Dengan kaca mata teori *social movement* kita dapat melihat bahwa ternyata Gulen memakai “*resource mobilization*” yang meliputi tiga tahap (McCarty, 1977: 1212-1241). *Pertama*, “*support base*”, sumber keuangan Gulen Movement diperoleh dari masyarakat. *Kedua*, “*strategy and tactics base*”, sumbangan masyarakat dipergunakan untuk melahirkan pebisnis Muslim di Turki. *Ketiga*, “*relations to larger society*”, menjaga hubungan dengan masyarakat luas lewat media massa. Melalui Samanyolu TV, Gulen berceramah, berdakwah dan menyentuh hati masyarakat. Gulen menyadari bahwa media sebagai alat dakwah merupakan kekuatan yang mampu mempengaruhi masyarakat Turki.

Dengan sokongan dana dalam jumlah besar dari pengikutnya, Gulen Movement terus-menerus mengembangkan sayap bisnis. Cara ini merupakan proses akumulasi ekonomi. Akumulasi ekonomi Gulen Movement yang tiada henti ini terlihat seperti upaya hegemoni Gulen terhadap negara Turki. Dalam teori neo-Gramscian, penguatan akumulasi ini bisa menggeser blok hegemoni lainnya, yaitu dominasi kelompok Islam politik.

Selama ini Gulen tampak berusaha menghindari persepsi bahwa ia sedang membangun hegemoni. Gulen menutupi dan menyembunyikan maksud ini dengan rapi. Alasannya, jika ia memperlihatkan ambisi tersebut terlalu dini, akan berakibat pada rusaknya reputasi gerakan Islam kultural ini. Bahkan sejak awal para pengikut Kemalis (kelompok sekular) mencurigai Gulen akan menguasai Turki dalam pengertian literal, dan merubah Turki menjadi negara Islam. Sedangkan kelompok Islam politik curiga, Gulen akan menghabisi dominasi mereka di panggung nasional Turki.

Kesuksesan ekonomi Gulen Movement sesungguhnya tidak lain adalah dampak positif dari proses neoliberalisme, privatisasi dan deregulasi ekonomi di Turki yang digelindingkan sejak 24

Januari 1980. Gulen Movement berhasil memanfaatkan kebijakan neoliberal dan globalisasi tersebut berkat berkurangnya monopoli negara atas ekonomi. Sejalan dengan teori Gramscian, Gulen Movement membangun hegemoni dengan tidak berkonflik dengan arus neoliberalisme global. Gulen Movement melakukan akumulasi ekonomi dengan laju yang mengesankan baik di pentas nasional maupun internasional. Dukungan Gulen atas pencalonan Turki sebagai anggota Uni Eropa merupakan taktik Gulen yang ingin mengembangkan akumulasi ekonomi di luar pasar Turki. Sokongan ini merupakan cara merebut posisi di pasar Eropa. Cara yang sama juga dilakukan untuk akumulasi di tengah masyarakat dunia.

Selain bidang ekonomi, akumulasi lain dilakukan dalam ranah pendidikan. Gulen Movement mendirikan sekolah-sekolah Gulen di seluruh dunia. Tersebarnya sekolah Gulen ini mengindikasikan bahwa Gulen Movement berkepentingan dengan integrasi Turki ke dalam arus global untuk melakukan akumulasi dalam ekonomi, sosial dan politik.

Jadi, neoliberal memberi manfaat bagi Gulen Movement dengan terbukanya ruang yang menghubungkan gerakan ini dengan neoliberal global. Dengan memasuki pasar global Gulen Movement mendefinisi ulang peran negara dalam proses neoliberalisasi, dan menggunakan idealisme neoliberal seperti demokrasi, kebebasan berpendapat dan HAM, untuk kepentingan akumulasi kekuatan gerakan Islam kultural ini. Dengan menggunakan HAM Gulen tidak segan-segan mengkritik pelanggaran HAM Erdogan terhadap demonstran Gezi Park. Islam tidak hilang dari peta sosial dan politik Turki, tetapi berubah menjadi mekanisme penyokong prinsip neoliberal. Saat ini, untuk akumulasi yang lebih besar, Gulen Movement sudah merambah dunia internasional, menjadi sebuah gerakan transnasional. Dalam proses tersebut, akumulasi tersebut menjadikan Gulen Movement sebagai *counter-hegemony* bagi blok hegemoni kelompok Islam politik Turki.

Senada dengan konsep neo-Gramscian, berkat neoliberalisme pintu masuk ke tengah masyarakat global terbuka lebar, Gulen Movement menjadi bagian dari arus utama neoliberal dunia internasional. Dengan menerima prinsip-prinsip neoliberal, Gulen mempertegas diri sebagai penolak ideologi Islam garis keras dan sebagai kelompok pejuang HAM, dialog antar-iman dan perdamaian dunia. Identitas moderat yang melekat pada Gulen Movement –dengan kaca mata teori neo-Gramscian- tidak lain merupakan dampak intersubjektif dari interaksi kelompok Islam kultural ini dengan masyarakat global.

Upaya akumulasi juga tampak saat Gulen memberi dukungan kepada AKP saat memenangi pemilu 2002. Berkat dukungan Gulen Movement yang memiliki kader di lembaga negara seperti Kepolisian dan Kehakiman, pemerintahan AKP berhasil menyingkirkan kekuatan militer dan sekular. Pada gilirannya, berkat dukungan mereka, AKP menjadi kuat, hampir tanpa pesaing. Erdogan menjadi sosok yang paling kuat dalam sejarah Turki modern, setara dengan Kemal Ataturk.

Balasan atas dukungan terhadap AKP, Gulen Movement mendapat “restu” dari Perdana Menteri Erdogan untuk menempatkan kader-kader terbaiknya di lembaga-lembaga negara. Proses “infiltrasi” berjalan dengan mulus di Kepolisian, Kehakiman dan Militer –untuk menyebut beberapa lembaga saja. Saat itu Gulen dan Erdogan bergandengan tangan dengan mesra. Akumulasi kekuatan Gulen semakin membesar. Selang beberapa tahun, kader-kader Gulen menempati posisi strategis di tiap lembaga negara. Kelak ketika hubungan Erdogan dan Gulen mulai retak, penempatan kader ini dikritik oleh Erdogan sebagai tindakan “infiltrasi” (penyusupan).

Dengan menguasai struktur lembaga negara, kekuatan Gulen Movement menggurita. Erdogan mengeluhkan ketundukan pejabat yang berafiliasi dengan Gulen Movement bukan pada pejabat di atasnya, tapi lebih banyak kepada

pimpinan struktur organisasi Gülen Movement. Tindakan insubordinasi ini memperlihatkan seakan-akan Gülen Movement bekerja secara mandiri di dalam sistem birokrasi negara Turki. Erdoğan menyebut Gülen Movement sebagai *parallel state*, atau negara (Gülen Movement) di dalam negara (Republik Turki). Insubordinasi para pejabat Gülen Movement ini dapat kita baca sebagai *counter-hegemony*.

Gülen Movement tidak sekedar sebuah komunitas keagamaan, tetapi sebuah struktur yang parallel dengan elit negara. Gerakan ini menjadi rival bagi penguasa. Meminjam teori neo-Gramscian, Gülen Movement berhasil mempengaruhi struktur negara dengan menggunakan neoliberalisme dan pasar global untuk membangun kelompok Islam kultural ini sebagai kekuatan *counter-hegemony*. Selama hampir satu dasawarsa – terutama sejak “bercerai” dari Erdoğan- Gülen Movement merepresentasikan diri sebagai gerakan oposisi melawan penguasa kelompok Islam politik.

Jadi, di pentas politik nasional Turki, Gülen Movement menjadi kekuatan *counter-hegemony* terhadap hegemoni kelompok Islam politik. Perebutan dominasi antara kedua kelompok Islam ini pada akhirnya meletus menjadi kudeta Turki 2016. Dalam bahasa Gramsci (1971: 219-220), kudeta kelima Turki ini dapat dibaca sebagai *Caesarism*, yaitu pertempuran antara blok hegemoni kelompok Islam politik (Presiden Erdoğan & AKP) melawan kelompok Islam kultural (Fethullah Gülen & Gülen Movement)

Kesimpulan

Kegagalan kelompok sekular melakukan konsolidasi hegemoni menyebabkan lahirnya krisis hegemoni. Selanjutnya krisis hegemoni ini membuka *space* bagi kelompok Islam politik yang diwakili oleh Recep Tayyip Erdoğan beserta partai politik AKP menjadi blok hegemoni baru di pentas nasional Turki. Setelah memenangi lima kali pemilu secara berturut-turut, dan berkuasa selama 15 tahun, konsolidasi hegemoni kelompok Islam politik ini mengandalkan kebijakan otoriter, bukan

consent rakyat Turki. Selain itu, setelah Erdogan sukses membawa Turki menjadi negara kaya urutan 18 dunia di masa awal kepemimpinannya, saat ini Turki mengalami pelambatan ekonomi. Gabungan antara otoritarianisme dan melambatnya ekonomi melahirkan krisis hegemoni kelompok Islam politik. Krisis hegemoni ini membuka *space* baru bagi kelompok Islam kultural –diwakili Gulen Movement— untuk menjadi blok hegemoni tandingan (*counter-hegemony*).

Kemunculan Gulen Movement sebagai blok *counter-hegemony* menyebabkan gesekan antara kelompok Islam kultural ini dengan blok hegemoni kelompok Islam politik. Perseteruan dua kelompok Islam ini berawal ketika Gulen Movement memanfaatkan sistem neoliberal, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk membangun akumulasi ekonomi, sosial dan politik. Keberhasilan akumulasi ini mengokohkan Gulen Movement sebagai blok hegemoni tandingan yang akhirnya memicu kudeta Turki 15 Juli 2016.

Daftar Pustaka

- Altınordu, Ateş. June 2017. "A Midsummer Night's Coup: Performance and Power in Turkey's July 15 Coup Attempt", *Qualitative Sociology*, Volume 40, Issue 2. page 139–164
- Azeri, Siyaves. 2016. "The July 15 Coup Attempt in Turkey: the Erdogan-Gulen Confrontation and the Fall of 'Moderate' Political Islam". *Critique*, 44:4. page 465-478.
- Baskan, Filiz. June 2010. "Religious versus Secular Groups in the Age of Globalisation in Turkey". *Totalitarian Movements and Political Religions*, Vol. 11, No. 2. page 167-183.
- Bayat, Asef. 2007. *Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamic Turn*, (Stanford, CA: Stanford University Press).
- Caliskan, Koray. 2016. "Explaining the End of Military Tutelary Regime and the July 15 Coup Attempt in Turkey". *Journal of Cultural Economy*, Vol. 10, No. 1. page 97-111.
- Carkoglu, Ali dan Yildirim, Kerem. Fall 2015. "Election Storm in Turkey: What do the Results of June and November

- 2015 Elections Tell Us?". *Insight Turkey*, Vol. 17, No. 4. page 57-79.
- Gramsci, Antonio. 1971. *Selections from the Prison Notebooks*, transl. by Quintin Hoare. New York: International Publishers.
- Harvey, David. 2005. *A Brief History of Neoliberalism*. New York: Oxford University Press.
- Icener, Zeyneb Cagliyan. Autumn 2016. "July 15: The Siege of Democracy in Turkey and the People's Unprecedented Resistance". *Bilig*, No. 79. page 107-128.
- Karatas, Birkan. 2012. "The Integration of Islamic Movements to the Neoliberal Economy in Turkey: The Case of Gülen Movement". Thesis Central European University.
- McCarthy, John D. dan Zaid, Mayer N. 1977. "Resource Mobilization and Social Movement: A Partial Theory". *American Journal of Sociology*, 82. page 1212-1241.
- Milan, F. Francesco. 2016. "Turkey: What Hides Behind a Failed Coup Attempt". *The RUSI Journal*, 161:4. page 28-32.
- Muedini, Fait. 2015. "The Politics between the Justice and Development Party (AKP) and the Gülen Movement in Turkey: Issues of Human Rights and Rising Authoritarianism". *Muslim World Journal of Human Right*, Vol. 12, No. 1. page 99-122.
- Patton, Marcie J. 2009. "The Synergy between Neoliberalism and Communitarianism: Erdogan's Third Way". *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East* 29, No. 3. page 438-449.
- Yavuz, M. Hakan dan Koc, Rasim. Winter 2016. "The Turkish Coup Attempt: The Gülen Movement vs. the State". *Middle East Policy*, Vol. XXIII, No. 4. page 136-148.
- Yavuz, M. Hakan. Autumn 1999. "Towards an Islamic Liberalism?: The Nurcu Movement and Fethullah Gülen". *Middle East Journal*, Vol. 53, No. 4. page 584-605.
- Yavuz, M. Hakan. 2000. "Cleansing Islam from the Public Sphere". *Journal of International Affairs*, Vol. 54, No. 1. page 21-43.
- Yavuz, M. Hakan. 2003a. "Gülen Movement: The Turkish Puritans", dalam *Turkish Islam and the Secular State*,

(ed.) M. Hakan Yavuz and John L. Esposito. New York: Syracuse University Press.

Yavuz, M. Hakan. 2003b. *Islamic Political Identity in Turkey*. New York: Oxford University Press.

[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_\(nominal\)](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal))). Diakses pada tanggal 23 Desember 2016.

Gulen Movement sebagai Counter-Hegemony

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

3%

★ acikbilim.yok.gov.tr

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On